

## **RELASI ETIKA DAN POLITIK:**

### **LANDASAN ETIS MEBANGUN POLITIK BERKEADABAN**

**Zakiyuddin Baidhawiy**

**Dosen STAIN Salatiga**

*"Perdamaian abadi hanya dapat diraih melalui nalar, sebagai lawan dari kekuasaan dan kepentingan politik" (Immanuel Kant).*

#### **Pendahuluan**

Dalam beberapa waktu terakhir, bangsa Indonesia menyaksikan beberapa peristiwa yang menunjukkan kebobrokan politik negeri ini. Dari aliran dana BI ke DPR, keterlibatan mafia Kejaksaan Agung dalam kasus BLBI, berlarutnya kasus Lapindo, penyimpangan aset BPPN, perseteruan antara Presiden SBY dan Zaenal Ma'arif, hingga korupsi DKP dan korupsi lainnya yang melibatkan sejumlah tokoh agama, politisi, eksekutif dan legislatif.

Dalam absurditas moral politik semacam ini, mungkinkah etika dipersandingkan dengan politik dalam simbiosis? Umumnya manusia Indonesia gamang apakah etika bisa bergandengan dengan politik. Karena etika terkait dengan moralitas, sementara politik cenderung pragmatis menurut kepentingan jangka pendek. Etika terkait domain yang mengarahkan kehidupan manusia yang baik. Politik berhubungan dengan relasi dan kontestasi kekuasaan.

Kebobrokan moral para politisi perlu diatasi melalui refleksi etis yang dibangun sebagai kapabilitas fundamental yang melandasi aksi politik etis. Aksi politik etis mensyaratkan politisi mampu berinisiatif melakukan berbagai tindakan baru. Setelah sebelumnya mengampustasi warisan moral masa lalu yang memalukan. Semua ini dilakukan di bawah pilihan bebas dengan mempertimbangkan determinasi etis suatu tindakan.

Dengan cara ini, politisi akan memandang orang lain sebagaimana ia memandang dirinya sendiri. Ia mampu bertindak empati sehingga aksi politiknya selalu memiliki tujuan luhur untuk membentuk kehidupan etis bersama dan untuk orang lain. Kehidupan etis yang lebih baik diselenggarakan melalui konsensus bersama mereka yang memiliki visi tercerahkan sebagai cerminan individu sekaligus warga negara yang manusiawi dan peduli keadilan.

Dalam konteks semacam inilah pertanyaan tentang pertelingkahan antara pragmatisme politik dan determinisme etis menjadi penting. Sejauhmana tujuan-tujuan maupun praktek-praktek, nilai-nilai dan sarana-sarana politik yang digunakan dalam percaturan berbangsa dan bernegara ini sudah memadai untuk mewujudkan suatu negara dan masyarakat yang berkeadaban dan etis?

### **Pertautan Etika dan Politik**

Etika acapkali digunakan saling menggantikan dengan moral. Moral berasal dari kata "mores" yang artinya kebiasaan. "Moralis" (adat, kebiasaan) merupakan istilah teknis yang mengalami perkembangan dari segi arti, yakni mengandung makna "moral". Moral selalu dikaitkan dengan kewajiban khusus, norma sebagai cara bertindak yang berupa tuntutan baik bersifat relatif maupun absolut. Jadi, moral adalah wacana normatif dan imperatif yang diungkapkan dalam kerangka yang baik dan yang buruk. Intinya moral hendak menjawab persoalan sebagaimana "seharusnya". Moral mengandung dua makna: keseluruhan aturan dan norma yang berlaku, yang diterima oleh suatu masyarakat sebagai pegangan dalam bertindak dan diungkapkan dalam kerangka yang baik dan yang buruk; disiplin filsafat yang merefleksikan aturan-aturan tersebut dalam rangka mencari landasan dan tujuannya.<sup>1</sup> Makna yang kedua ini lebih mirip dengan konsep "etika".

---

<sup>1</sup> Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003, hal. 186-187.

Etika biasanya sering dipahami sebagai refleksi filosofis tentang moral. Etika lebih mengutamakan wacana normatif tetapi tidak selalu harus imperatif, karena bisa juga bersifat hipotetis yang membicarakan pertentangan antara yang baik dan yang buruk, yang dipandang sebagai nilai relatif. Sesuatu yang baik dan yang buruk ditentukan sejauh mana proses nalar dan nurani manusia dapat menangkap gejala-gejala kebaikan dan keburukan dari suatu niat dan tindakan. Etika hendak menjawab pertanyaan tentang sesuatu "senyatanya". Karena itu, etika berhubungan langsung dengan praktik dalam pengertian obyektif sesuai dengan apa yang senyatanya dilakukan menurut pikiran dan suara hati manusia. Lebih tepatnya, etika adalah ilmu teoretik tentang yang benar.<sup>2</sup>

Sementara itu, filsafat politik merupakan ilmu praktis yang bicara mengenai yang benar pada tingkatan praktis. Karena itu, tidak ada konflik antara filsafat politik sebagai ilmu praktis dan filsafat moral atau etika sebagai ilmu teoretik tentang yang benar. Tidak ada pertentangan antara praktik dan teori. Politik sebagai seni menerapkan tatanan mekanis kehidupan kedalam wilayah pengaturan manusia. Karenanya politik menyusun keseluruhan kebijaksanaan praktis dan konsepsi tentang yang benar; mengkombinasikan tatanan alam dengan metode ilmu politik.

Baik etika maupun politik keduanya berperan untuk mengatur atau mengarahkan perilaku manusia. Perbedaannya terletak pada kekuatan dalam pengaturan dan perbedaan tuntutan yang berhubungan dengan kualitas-kualitas personal. Kelompok-kelompok, kelas-kelas dan individu-individu yang terpisah secara moral saling terhubung. Bergantung pada kerumitan-kerumitan historis-politis dalam kesalinghubungan ini, sebagian kualitas moral politisi dengan mudah dapat dikembangkan, sementara sebagian lainnya yang secara historis

---

<sup>2</sup> Bahasan serupa tentang titik singgung antara etika, moral, dan moralitas, bahasan tentang subjek etika, roblem baik dan buruk, dapat dilihat dalam Peter Singer (ed.) *A Companion to Ethics* (Oxford: Blackwell Publishers 1997) hal. 3-14, dan 91-106.

maupun politis konflik dengan kebijakan dan tujuan-tujuan politiknya akan berhenti tumbuh dan kualitas-kualitas negatif sebagai gantinya.

Sebagai pengatur, etika atau moralitas diarahkan kepada yang lain: artinya ia peduli dengan relasi antarpersonal dan interrelasi antara individu dan kelompok. Berbeda dari etika, politik mengatur utamanya relasi antara kelompok dan negara dan antara berbagai organisasi sosial-politik; secara langsung maupun tidak langsung semua ini berkaitan dengan fungsi kekuasaan negara.

Oleh karena itu, batas-batas antara wilayah etika dan politik sangat fleksibel. Dalam suatu waktu relasi tersebut dapat diatur oleh mekanisme moral, yang pada waktu lainnya diatur oleh mekanisme politik. Interaksi antara dua mekanisme ini tergantung pada kontradiksi-kontradiksi sosial tertentu dan kemungkinan-kemungkinan obyektif pencapaian tujuan-tujuan kelas, bangsa dan negara melalui tindakan yang sesuai dengan, atau mengabaikan, nilai-nilai dan norma-norma moral.

Fleksibilitas batas-batas antara moralitas dan politik melahirkan diferensiasi antara moralitas privat dan moralitas publik dalam kehidupan sosial, antara moralitas individu dan moralitas politik dari kelompok-kelompok. Di satu sisi, rezim-rezim politik yang sentralisir cenderung memperluas wilayah aksi politik dan hubungannya dengan moral, sementara membatasi serangkaian wilayah moral yang berhubungan dengan aktivitas hidup dan interrelasi antara individu-individu dan antara individu dan kelompok. Di sisi lain, relasi antara wilayah privat dan wilayah publik kehidupan manusia memiliki karakter historis. Marx yakin bahwa abstraksi kehidupan privat adalah satu-satunya karakteristik masa modern. Abstraksi ini mencerminkan tumbuhnya individualitas dan otonomi person dan pada saat yang sama merupakan ekspresi kerumitan individualisme dengan konotasinya bahwa masing-masing individu bebas

mengejar hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tidak dapat diasingkan; bahwa ia membuat keputusan-keputusan yang, jika mereka tidak campur tangan terhadap orang lain, tidak harus tunduk pada kontrol dan sanksi.

Di satu sisi ada individu dengan kehidupan privatnya yang tidak peduli pada siapapun. Di sisi lain, ada kehidupan publik yang berhubungan dengan politik dan negara. Ini merujuk bukan pada tujuan dan kepentingan privat, namun pada tujuan dan kepedulian bersama setiap orang. Dengan cara ini, moralitas dibagi menjadi moralitas privat dan publik, moralitas individu dan politik. Karena relasi antara wilayah publik dan privat dalam kehidupan sosial bersifat historis, pemisahan dan kontras antara keduanya sangat jelas tergambar di masa modern. Teori kuno tentang moralitas dan politik tidak mempertentangkannya, politik berhubungan langsung dengan moralitas. Jadi, Aristoteles tidak membuat perbedaan apapun antara moralitas privat dan publik; etika pada saat yang sama adalah politik. Menurutnya, etika (dalam pengertian klasik) membutuhkan politik sebagai tempat untuk implementasinya; bahwa etika dalam pengertian fundamental adalah politik. Etika adalah politik sejauh ditujukan untuk pencapaian kebahagiaan manusia – aktivitas jiwa yang sesuai dengan keutamaan dan kehidupan abadi – dan bersifat publik baik dalam arti pencapaian menghendaki kehadiran mitra sederajat sebagai syarat kelahirannya dan dalam arti keutamaan yang dicapai dapat diakui secara publik.<sup>3</sup> Hal serupa terjadi pada Plato. Kontras antara moralitas dan politik dan kecenderungan untuk mensubordinasi moralitas pada politik dan memberi moralitas publik peran utama menjadi dominan dengan kemunculan kapitalisme.

---

<sup>3</sup> Pemahaman etika sebagai politik bukan hanya konsepsi yang beroperasi untuk tradisi polis kuno (di mana Aristoteles memformulasikan etikanya) dalam *Nicomachean Ethics*, namun juga dapat diterapkan untuk konteks negara modern yang kompleks.

Persinggungan politik dan etika, menurut Paul Ricoeur, disusun oleh konsensus konvergen di seputar tradisi-tradisi di mana suatu komunitas mengambil motivasi untuk hidup. Dalam pandangannya, politik terbagi kedalam dua bagian: keyakinan moral yang didefinisikan oleh keutamaan dari pilihan-pilihan; tanggung jawab moral yang didefinisikan oleh konteks historis dan penggunaan kekerasan dalam skala moderat. Ricoeur mengajukan diskusi moral di mana keyakinan-keyakinan para kontestan politik harus tunduk pada kepentingan universal. Dalam hal ini, sudut pandang orang lain dan keyakinan-keyakinan etis didasarkan pada keadilan tradisi yang harus dipertimbangkan. Dalam pandangannya juga, konsep tanggung jawab diperluas oleh rasa solidaritas dan persahabatan. Jadi ia ditransformasi menjadi tanggung jawab terhadap yang lain. Jadi, aksi politik harus diwarnai oleh kepercayaan dan harus mempromosikan kesejahteraan bersama. Interseksi antara ekonomi, politik dan etika memperbaiki individu-individu menuju hidup baik bersama dan untuk orang lain dan dalam masyarakat yang adil.<sup>4</sup>

Berangkat dari penjelasan di muka, dapat dikatakan bahwa etika dan politik memiliki ranah persinggungan yang tidak selalu mesti dipertentangkan, namun sebaliknya dapat pula saling memberi dan menerima dan bahkan saling membutuhkan. Persinggungan inilah yang melahirkan kenyataan bahwa "etika politik" dapat dijadikan sebagai titik berangkat dari filsafat politik, setidaknya karena dua alasan berikut. *Pertama*, politik dan kekuasaan minus refleksi etis-filosofis dapat menyebabkan terjadinya pemiskinan politik. Dengan refleksi etis-filosofis, orang diajak berpikir kritis tentang tujuan-tujuan politik, institusi-institusi yang merealisasikan tujuan-tujuan tersebut, sekaligus tindakan-tindakan atau perilaku politik dari suatu rezim. Dengan refleksi ini pula orang dapat terhindar dari cara pandang yang sempit, jangka pendek, dan monokausal

---

<sup>4</sup> Lihat karya-karya Paul Ricoeur untuk bahasan masalah ini lebih detail dalam *Political and Social Essays* (Athens: Ohio University Press, 1975); *Soi-meme comme un autre*. . . terj. oleh Kathleen Blamey (Chicago: Chicago University Press, 1992).

(selalu memandang suatu masalah hanya dari satu sebabnya yang bersifat langsung). *Kedua*, filsafat politik yang berangkat dari landasan moral membawa para pelaku untuk mencari makna dan nilai dalam politik. Cara pandang semacam ini harus mengakar dalam komunitas yang menyebar, yang diorganisir dalam bentuk negara, dan mampu mengambil keputusan-keputusan dengan penuh kepekaan moral.

Dua hal patut dijawab di sini menyangkut: bagaimana agar filsafat politik yang berangkat dari moral (baca: etika politik) tidak menjebak diri pada perdebatan yang abstrak; dan bagaimana agar filsafat politik tidak semata bicara tentang perilaku politikus (aksi politik minus tujuan dan institusi politik). Berkenaan dengan persoalan pertama, pernyataan-pernyataan moral perlu ditransformasi menjadi manifestasi operasional. Dengan kata lain, moral bukan semata urusan individu namun ia diobyektifikasi menjadi sudut pandang kolektif. Bila moral berhenti pada urusan individu atau ukuran-ukuran personal, ia lebih menilai persoalan-persoalan politik dari sudut maksud, menimbang kejahatan-kebaikan, memberikan batasan-batasan, namun belum cukup memotivasi kolektivitas untuk bertindak. Pendeknya, ia lebih suka melarang, namun kurang membekali keberanian untuk bertindak. Dengan demikian, obyektifikasi moral menjadi manifestasi operasional mengandaikan pengambilan jarak (*distance*) terhadap realitas politik; menuntut perspektif tertentu dan pengujian atas nilai-nilai termasuk nilai-nilai moral; dan memerlukan perbandingan dengan suatu ideal yang melibatkan konsepsi tentang manusia dan tujuannya.

Filsafat politik dapat menghindarkan diri dari jebakan melulu bicara perilaku politikus bilamana ia mencakup keseluruhan dari tiga dimensi saling terkait, yakni dimensi teleologis (tujuan-tujuan politik), institusional (sarana-sarana untuk menghantarkan pada perwujudan tujuan-tujuan politik), dan aksi politik. Yang pertama terumuskan dalam tujuan-tujuan hidup bersama, berbangsa dan bernegara (berpolitik) berdasarkan konsensus kolektif

(komunitas, masyarakat, dst.). Tujuan-tujuan ini lebih konkret dapat dibaca melalui kebijakan-kebijakan dan manajemen publik (*public policy and management*), bagaimana prioritasnya, apa programnya, bagaimana metodenya, dan kerangka filosofisnya. Kejelasan tujuan yang terumus dalam kebijakan publik menunjukkan ketajaman visi pemimpin/politikus dan kepedulian partai politik terhadap aspirasi masyarakat. Kebijakan-kebijakannya menjadi transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi institusional menyangkut sarana yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan politik. Ini meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian penyelenggaraan negara dan institusi-institusi sosial, dan karenanya ia mengandung dua pola normatif: tatanan politik (hukum dan institusi) harus mengikuti prinsip solidaritas, subsidiaritas,<sup>5</sup> pluralitas, dan struktur sosial diatur menurut prinsip keadilan; kekuatan-kekuatan politik ditata sesuai dengan prinsip timbal balik.

Dimensi aksi politik berperan menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri dari rasionalitas tindakan dan keutamaan atau kualitas moral pelakunya. Sebuah tindakan politik dikatakan rasional jika pelaku paham persoalan dan berorientasi situasional. Artinya, ia harus mampu mempersepsi kepentingan-kepentingan yang dipertaruhkan dan dampak dari aksi politiknya. Aksi politik *nirkekerasan* merupakan imperatif moral yang tidak dapat ditawar-tawar dan karenanya manajemen konflik menjadi syarat bagi aksi politik etis.

---

<sup>5</sup> Prinsip ini mengatur hubungan antara individu-kelompok-negara; prinsip ini menegaskan bahwa apa yang diurus dan diselesaikan oleh kelompok yang lebih kecil dengan kemampuan dan sarana yang ada, maka kelompok yang lebih besar (negara) tidak boleh campur tangan. Negara hanya boleh campur tangan sejauh membantu individu dan kolektivitas yang lebih kecil darinya dan mengupayakan kesejahteraan umum dan dalam mewujudkan keadilan distributif. Melalui prinsip ini, peran negara terbatas dan tidak mengurus semua hal sehingga lebih efektif menjalankan tugas-tugas pokoknya; akan tumbuh inisiatif dan partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat dalam upaya membangun kesejahteraan bersama. Prinsip ini dapat mengubah orientasi politik yang sangat bias kepada negara menuju ke politik memihak warga negara.



Sedangkan keutamaan dalam aksi politik mencakup: penguasaan diri serta keberanian mengambil keputusan dan menghadapi resikonya.<sup>6</sup>

Suatu tindakan disebut sebagai "aksi politik" bila ia memiliki makna, identitas dan sarat nilai. Sebagai bagian dari aktivitas manusia, aksi politik berbeda dengan dua aktivitas lainnya yang lebih rendah, yakni kerja dan karya. Hannah Arendt menjelaskan perbedaan tiga aktivitas itu sebagai berikut.<sup>7</sup> Kerja adalah sarana manusia untuk dapat survival, bertahan hidup. Manusia dalam hal ini fokus pada dimensi biologis dan jasmaniah, sehingga bekerja merupakan perbudakan demi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, manusia sering disebut sebagai *animal laborans*.<sup>8</sup> Orientasi *animal laborans* adalah bagaimana kerja bisa lancar dan konsumsi dapat dijaga baik. Persandingan kerja dan konsumsi tidak memberi kesempatan pekerja mengenali identitasnya, hasil kerjanya dan memperoleh pengakuan. Orientasi semata memenuhi kebutuhan biologis ini menyebabkan manusia lemah dalam merefleksi kehidupan dan terjebak dalam kesadaran praktis. Dan karenanya ia tidak kritis.

Manusia yang berorientasi kerja memandang nilai tertinggi (*summum bonum*) adalah hidup; keprihatinan utamanya fokus pada tubuh; obsesinya tertuju pada daur produksi-konsumsi; hukum eksistensinya terletak pada kebutuhan; dan ruang privat menjadi ruang kehidupan otentik.

Melalui karya, manusia dapat meningkatkan diri dari *animal laborans* menuju *homo faber*. Karya menghasilkan obyek dan melaluinya manusia dapat menguasai alam dan membebaskan diri dari kepatuhan binatang. Ia menciptakan obyek yang bermanfaat bagi dunia agar pantas menjadi habitat manusia. Karenanya ukuran utama bagi *homo faber* adalah utilitas. Karya

---

<sup>6</sup> Bernhard Sutor, *Politische Ethik* (Paderborn: Ferdinand Schöningh, 1991), hal 86, lihat juga penjelasan mengenai tiga hal ini secara ringkas oleh Haryatmoko, *ibid.*, hal. 25-27.

<sup>7</sup> Lihat penjelasan detail ini dalam Hannah Arendt, *The Human Condition* (Chicago: the Chicago University Press, 1958).

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 128.

membutuhkan eksistensi orang lain dengan mana ia memperoleh pengakuan atas nilai dan prestasi. Maka ruang publik baginya adalah pasar yang menjadi tempat pengakuan akan kebutuhan atas yang lain. Hukum eksistensi terletak pada pengungkapan diri manusia.

Namun demikian, karya belum sampai pada pencapaian hubungan antarpribadi. Karya belum mampu menciptakan ruang publik yang otonom. Karya masih sangat terikat dengan ruang penampakan, artinya pengakuan identitas tergantung pada hasil karyanya, padahal karya itu tidak terlepas dari obyek-obyek konkret yang diproduksinya.<sup>9</sup> Karena itu, kehidupan profesional hanya berhenti pada titik kehidupan apolitik karena lebih menekankan diri pada kompetensi dan bukan kualitas sebuah relasi.

Hanya dalam aksi politik kita dapat menjumpai relasi antarmanusia secara langsung tanpa mediasi obyek maupun materi. Aktivitas ini bersentuhan langsung dengan pluralitas manusia dan karenanya ia menciptakan ruang publik yang terdiri dari dua dimensi: ruang kebebasan politik dan kesamaan; dan dunia bersama dalam bentuk institusi dan lingkup yang memberi konteks permanen bagi kegiatan warga negara.<sup>10</sup> Ciri-ciri aksi politik semacam ini adalah: tindakan politik mensyaratkan pluralitas karena didalamnya terjadi proses negosiasi-kompromi, penolakan-persetujuan, dan kerjasama. Keragaman pelaku politik mendorong kualitas sebuah aksi politik dinilai dari berbagai perspektif guna meraih legitimasi. Dengan demikian, aksi politik membutuhkan pengakuan dari orang lain sehingga menjadi kegiatan bermakna, bernilai dan beridentitas. Ciri kedua adalah penyingkapan identitas pelaku melalui tindakan dan wicara. Tindakan membuat dunia ini dapat diatur dan dikendalikan sekaligus menjadikan manusia sebagai makhluk bertanggung jawab. Dan melalui wicara, aksi politik berhasil menyingkap pelaku dan makna. Demokrasi tanpa wicara akan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 274.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 41-42.

melahirkan kekerasan, karena wicara merupakan jembatan untuk mengkomunikasikan keragaman. Kekerasan merupakan bukti bahwa wicara atau dialog menemukan jalan buntu. Melalui wicara juga aksi politik dapat dipahami maksud dan tujuannya.

### **Etika Politik sebagai Landasan Berpolitik**

Bahasan di muka menandai bahwa urusan politik yang selalu dipercaya sebagian atau bahkan banyak orang jauh dari praktik-praktik yang bersih, tidak dapat dibenarkan sepenuhnya. Tujuan menghalalkan segala cara memang sering terjadi dalam dunia politik, namun masih ada diantara para pelaku politik atau politikus yang punya kepedulian akan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Misalnya, bila kita menyaksikan ada orang menuntut ditegakkannya keadilan, menunjukkan keberpihakan kepada mereka yang tertindas dan menjadi korban pembangunan, berupaya melakukan pemberdayaan masyarakat melalui *civil society*, mengusung dan membangun budaya demokrasi, itu merupakan tengara bahwa etika politik masih diperjuangkan. Lebih-lebih dalam situasi *chaos*, di mana kebobrokan moral bangsa ini nyaris sempurna, meminjam bahasa Syafii Maarif, etika politik bagaimanapun sangat diperlukan meski upaya menumbuhkan kembali kesadaran moral itu sulit seperti menegakkan benang basah.

Betapapun hingar bingar politik yang tidak mengenal *fatsoen* dalam satu dekade ini, tindakan-tindakan politik tetap membutuhkan legitimasi. Legitimasi ini tentu berasal dari norma-norma moral, nilai-nilai hukum atau peraturan perundangan. Dalam kernagka inilah kita masih punya peluang dan harapan dalam mana etika politik dapat bersuara lantang di tengah-tengah kebingungan orientasi para politisi yang gamang. Di sisi lain, etika politik dapat diandalkan sebagai juru bicara atas nama mereka yang menjadi obyek penindasan, kesewenang-wenangan, ketidakadilan, pendeknya korban dari semua bentuk

kezaliman politik. Stalin boleh mengatakan bahwa matinya satu jiwa adalah tragedi, namun matinya beribu-ribu atau bahkan berjuta-juta jiwa hanyalah statistik. Namun, bagaimanapun kesadaran akan pentingnya membela korban akibat politik tidak tahu malu dan zalim, dapat membangkitkan empati dan respon terusik dan protes terhadap semua bentuk penyimpangan (*indignation*). Empati dan keberpihakan ini akan memotivasi politisi untuk menentang cara-cara berpolitik tidak bermoral dan fatsoen politik yang hilang dalam kesadaran kolektif bangsa.

Pada saat yang sama, politik sebagai arena pertarungan kekuasaan di lingkaran-lingkaran tertentu dan konflik antar berbagai kepentingan yang saling tarik ulur dan centang perenang, menunjukkan bukti bahwa kesadaran untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa secara adil dan bermoral adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Cara mengatasi masalah semacam ini tentu perlu mengacu kepada etika politik. Keharusan perubahan-perubahan politik dilakukan secara konstitusional dan dalam koridor demokrasi adalah dua tanda utama bahwa etika politik tidak dapat dikesampingkan. Intinya, krisis politik kontemporer membuka celah bagi tampilnya kembali pemikiran politik etis yang baru, di mana etika dapat memainkan peran signifikan dalam wilayah publik.<sup>11</sup>

Pentingnya pertautan antara etika dan politik yang mengandaikan etika politik sebagai rujukan bagi tindakan-tindakan politik, menurut Paul Ricoeur, tidak lain bertujuan untuk mengarahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, hidup bersama dan untuk orang lain, dan dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil. Melalui etika politik kita dapat menganalisis korelasi antara tindakan

---

<sup>11</sup> Perdebatan-perdebatan tentang politik kontemporer, krisis, dan perlunya pemikiran politik etis yang baru, serta kekhasan etika dalam domain publik, lihat lebih lanjut Peter Singer (ed.) *A Companion to Ethics*...259-273; dan William L. Richter, Frances Burke, Jameson W. Doig (eds.), *Combating Corruption, Encouraging Ethics* (Washington, DC: ASPA, 1990), hal. 1-6.

individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur yang ada. Korelasi antara ketiganya perlu memperoleh penegasan untuk menghindarkan dari pemahaman yang salah atau reduksionistik bahwa etika politik hanya sekadar etika individual, perilaku individu dalam bernegara. Pengertian etika politik dalam perspektif Ricoeur mengandung tiga tuntutan utama: upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain; upaya memperluas lingkup kebebasan; dan membangun institusi-institusi yang adil.<sup>12</sup> Ketiganya memiliki hubungan terkait dan saling bergantung.

Hidup baik bersama dan untuk orang lain tidak dapat termanifestasi dalam kehidupan berpolitik hanya jika ada kesiapan untuk menerima keragaman internal maupun eksternal dan keragaman itu berada dalam bingkai institusi-institusi yang adil. Hidup baik merupakan cita-cita kebebasan, yaitu kesempurnaan eksistensi atau pencapaian keutamaan. Institusi-institusi yang adil memungkinkan perwujudan kebebasan dengan menghindarkan warganegara atau kelompok-kelompok dari tindakan-tindakan yang saling merugikan satu dengan yang lain. Dan sebaliknya, kebebasan warganegara mendorong inisiatif dan sikap kritis terhadap institusi-institusi yang tidak adil dan otoriter. Apa yang dimaksud kebebasan di sini adalah syarat fisik, sosial, dan politik yang dibutuhkan demi pelaksanaan nyata kebebasan atau disebut *democratic liberties*: meliputi kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan sebagainya.

Dalam definisi Ricoeur, etika politik tidak hanya menyangkut perilaku individu, tetapi terkait dengan etika sosial. Dalam etika politik, untuk dapat mewujudkan pandangan individu dibutuhkan persetujuan dari sebanyak mungkin warganegara karena menyangkut tindakan kolektif. Dengan demikian, relasi antara pandangan hidup individu dengan tindakan kolektif bersifat tidak langsung. Diperlukan mediasi yang berfungsi menjembatani pandangan pribadi

---

<sup>12</sup> Paul Ricoeur, *Soi-meme comme un autre*. . terj. oleh Kathleen Blamey (Chicago: Chicago University Press, 1992); Cf Haryatmoko, "Etika Politik Bukan Hanya Moralitas Politikus", dalam [http://tumasouw.tripod.com/artikel/etika\\_politik\\_bukan\\_hanya\\_moralitas.htm](http://tumasouw.tripod.com/artikel/etika_politik_bukan_hanya_moralitas.htm)

dengan tindakan kolektif. Media itu dapat berupa simbol-simbol maupun nilai-nilai: simbol-simbol agama, demokrasi, dan nilai-nilai keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan sebagainya. Melalui simbol-simbol dan nilai-nilai itu, politikus berusaha meyakinkan sebanyak mungkin warganegara agar menerima pandangannya sehingga mendorong kepada tindakan bersama.

Oleh karena itu, politik disebut sebagai *the art of negotiation*. Disebut seni negosiasi karena ia membutuhkan kemampuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan banyak orang melalui wicara dan persuasi, bukan manipulasi, kebohongan, apalagi kekerasan. Etika politik akan kritis terhadap manipulasi atau penyalahgunaan nilai-nilai dan simbol-simbol itu. Ia berkaitan dengan masalah struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mengkondisikan tindakan kolektif.

Tuntutan ketiga dari etika politik adalah terbangunnya institusi-institusi sosial yang adil. Institusi-institusi ini mempengaruhi kegiatan struktur dasar masyarakat yang landasannya adalah kebebasan dasar.<sup>13</sup> Dalam struktur dasar masyarakat, sudah terkandung berbagai posisi sosial dan harapan masa depan anggota masyarakat berbeda-beda dan sebagian ditentukan oleh sistem politik dan kondisi sosial-ekonomi. Institusi-institusi sosial tertentu mendefinisikan hak-hak dan kewajiban masyarakat, yang pada gilirannya akan mempengaruhi masa depan setiap orang, cita-citanya, dan kemungkinan terwujudnya. Kedudukan dan fungsi-fungsi dalam kegiatan struktur dasar masyarakat itu harus diberikan kepada semua warga secara sama, “perataan” dan “perlakuan yang sama”. Maka “ketidaksamaan” itu lantas diartikan sebagai tidak seimbang

---

<sup>13</sup>John Rawls menjadikan kebebasan-dasar sebagai kebebasan yang perlu untuk dapat menjadi peserta penuh dari kegiatan struktur-dasar masyarakat. Misalnya saja: kebebasan berpolitik, hak bersuara, hak mendapatkan kedudukan dan fungsi, kebebasan berpikir, hak mengusahakan dan memiliki harta pribadi, kebebasan untuk tidak ditangkap sewenang-wenang, dan kebebasan untuk tidak ditahan dan diadili tanpa prosedur hukum, lihat *A Theory of Justice*, cetakan ke-22 (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1997), hal. 61.

pembagian keuntungan karena tidak adanya kesempatan yang sama dalam mendapatkan kedudukan dan fungsi-fungsi tersebut. Bagi John Rawls, beranekaragamnya fungsi dan kedudukan itu tidak menjadi soal. Yang relevan untuk keadilan ialah ada tidaknya kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk mendapatkan fungsi-fungsi dan kedudukan-kedudukan itu. Karena dengan fungsi-fungsi dan kedudukan-kedudukan itulah keuntungan kegiatan struktur-dasar masyarakat dibagikan. Namun besarnya jumlah keuntungan yang didapat oleh setiap pihak memang tidak harus sama. Yang relevan untuk konsep keadilan ialah mengenai ada tidaknya kemungkinan bagi setiap peserta untuk memperkembangkan kepentingan-kepentingan dirinya, dengan bagian keuntungan yang didapatnya itu. Kalau dalam kegiatan struktur-dasar masyarakat itu masih ada peserta yang tidak mempunyai kemungkinan memperkembangkan dirinya, maka kegiatan struktur-dasar masyarakat itu belumlah adil.

Memperhatikan paparan di atas, jelas bahwa keutamaan moral politikus saja belum cukup tanpa adanya komitmen untuk merombak institusi-institusi sosial yang tidak adil sebagai penyebab laten dari kekerasan yang sering terjadi di negeri ini.

Memenuhi tuntutan pertama dalam etika politik – hidup baik bersama dan untuk orang lain – mensyaratkan moralitas dalam diri pelaku politik baik secara individu lebih-lebih secara kolektif. Untuk itu, berguna mempertimbangkan metafora Immanuel Kant mengenai "politisi bermoral" dan "moralis politis" untuk menjelaskan bagaimana moralitas itu merupakan keharusan dalam politik,

dan bagaimana politik merupakan satu cabang penerapan dari hak-hak dan kebenaran.<sup>14</sup>

Moralitas adalah seperangkat hukum yang menyatakan bagaimana tindakan-tindakan manusia harus diatur. Pada intinya ia bersifat praktis. Menurut imperatif kategoris Kant, kita memiliki kewajiban untuk bertindak sebagaimana moralitas anjurkan agar kita lakukan. Meskipun nalar tidak dapat memprediksi akibat-akibat seluruh tindakan manusia, nalar bagaimanapun dapat mengatakan bagaimana kita bertindak jika kita ingin mencapai tujuan utama.

### **Politisi Bermoral**

Politisi bermoral adalah individu-individu yang memegang teguh prinsip-prinsip kebijaksanaan politik yang dengan cara demikian mereka dapat hidup bersama dengan moralitas; Sebutan ini ditujukan kepada mereka yang mengutamakan moral, mengikuti prinsip-prinsip moral sambil berusaha untuk mendamaikannya dengan kebijakan politik praktis. Bagi mereka, segala sesuatu dilakukan di luar kewajiban. Sebutan lain bagi politisi bermoral adalah "politisi jujur atau politisi tulus".<sup>15</sup> Yakni, mereka yang mengejar dan mempraktikkan pragmatisme yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip atau dasar-dasar keberanian untuk mengatakan segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Prinsip ini sesuai dengan hadits nabi Saw tentang pentingnya mengatakan kebenaran meski pahit dirasakan (*qul alhaqq walau kana murrann*). Tentu saja mengatakan kebenaran ini harus selalu dengan sikap yang konstruktif. Sebaliknya, kritik tak bertanggung jawab, yaitu usaha untuk mengekspos dan mempublikasi suatu

---

<sup>14</sup> Diskusi secara panjang lebar mengenai metafora politisi bermoral dan moralis politis ini dapat dijumpai dalam karya Immanuel Kant, *Perpetual Peace: A Philosophical Essay*, terj. M. Campbell Smith, (Bristol: Thoemmes, 1992).

<sup>15</sup> Aleksander Kwasniewski, "Is honest politics possible?" *Daily Time*, Wednesday, December 25, 2002.



masalah yang tidak diikuti iktikad baik untuk memberikan solusi yang positif, barangkali merupakan suatu bentuk ketidaktulusan yang paling mudah dijumpai di dunia politik. Mereka yang menghendaki untuk memperlakukan politik dan moral secara terpisah tidak pernah dapat memahami apapun. Jadi, menurut Jean-Jacques Rousseau, praktik politik bukan hanya dapat bahkan harus didamaikan dengan imperatif kejujuran dan ketulusan.

Adakah kejujuran atau ketulusan dalam diri seorang politisi? Mungkinkah semua politisi menjadi seorang yang jujur dan tulus? Pertanyaan ini langsung menohok ke jantung demokrasi. Misalnya, ketika para pemilih mengecam begitu saja para politisi sebagai orang tidak jujur, maka gerakan-gerakan anti-demokrasi tumbuh subur. Padahal semua politisi tahu bahwa ambiguitas dan kompromi cenderung sebagai pemenang di atas kebenaran-kebenaran universal. Kadang-kadang kita harus memilih keburukan yang lebih kecil. Standar-standar umum yang kita miliki tentang kebobrokan dan kebajikan tidak selalu dapat diberlakukan – namun bukan karena sinisme dan hipokrisi adalah sesuatu yang mewarnai seluruh persoalan politik.

Ketidakjujuran politik pada akhirnya mengambil beberapa bentuk. Mari kita identifikasi beberapa macam yang dapat disebutkan di sini. *Pertama*, seseorang yang tidak jujur dalam memulai sesuatu. Orang semacam ini bisa saja berasal dari pemimpin, ideolog, atau diplomat yang tidak jujur di lingkungan sekitar kita. *Kedua*, orang amatiran yang tindakan-tindakannya dapat membahayakan kepentingan-kepentingan positif yang hendak dicapai. Yang terakhir ini dapat disebut sebagai "penjudi" politik yang mempergunakan kompetensi dengan cara yang salah. Mereka adalah orang yang terampil namun zalim, tinggi hati dan kurang reflektif. Para penjudi ini erat hubungannya dengan para "pembuat onar" politik yang mengejar ambisinya dengan berbagai cara apapun resikonya dan tanpa mempertimbangkan biaya bagi orang lain. *Ketiga*, orang-orang yang "fanatik" dalam politik juga menggambarkan ketidakjujuran.

Mereka diikat oleh keyakinan bahwa dirinya benar secara mutlak dalam segala hal. Orang-orang fanatik ini tidak fleksibel dan inersia yang siap menggilas segala hal menurut caranya sendiri. Di atas semua yang telah dipaparkan tentang macam-macam politisi tidak jujur/tulus di muka, bentuk-bentuk pragmatisme yang sinis mengambil posisi di depan dan menerapkan prinsip bahwa "tujuan menghalalkan segala cara"<sup>16</sup> meskipun imperatif-imperatif moral bertentangan dengan kepentingan-kepentingan politik.

Pada sisi ekstrem yang lain adalah pandangan-pandangan naif dan utopian dapat dikatakan sama dengan ketidakjujuran. Mereka yang berpandangan semacam ini melihat politik sebagai wilayah relativisme dan gagal membangkitkan moralitas di dunia politik. Meski demikian, bukan berarti kita tidak dapat mengidentifikasi para politisi yang jujur. Immanuel Kant sebagaimana digambarkan di muka menjelaskan dua jenis politisi. Para politisi yang tidak jujur atau tidak tulus itu disebut sebagai "moralis politis" yang ingin "menghancurleburkan moralitas" dalam hubungannya dengan prasyarat-prasyarat politik yang mereka justifikasi sebagai permainan sinis. Istilah ini bisa diterapkan untuk semua jenis politisi yang tidak jujur seperti telah digambarkan di atas. Sementara itu, politisi bermoral adalah mereka yang menolak pragmatisme sinis dan tidak mengalah pada godaan pandangan moral yang naif. Jadi, politisi yang jujur/tulus adalah mereka yang memandang politik sebagai alat untuk mencapai kebaikan bersama, kemaslahatan umum (*al-maslahah al-`ammah*). Mereka bukan orang yang naif, dan tahu bahwa kesabaran, kompromi, dan kebijakan untuk memulai dari langkah-langkah kecil dibutuhkan. Pada saat yang sama, dalam meraih tujuan parsial mereka tidak akan kehilangan visi tentang tujuan-tujuan yang lebih besar dan luhur.

---

<sup>16</sup> Nicollo Machiavelli adalah orang pertama yang mendasarkan prinsip ini dalam berpolitik. Dengan prinsip ini, politik tampil dengan hukum rimba siapa kuat dia yang menang, persis seperti prinsip Darwinisme Sosial yang mengatakan *survival for the fittest*.

Di sinilah mengapa tata kelola yang baik (*good governance*) merupakan ujian terbaik bagi kejujuran dan ketulusan politik. Di negara-negara demokratis, jika politisi yang mengkritik politisi lain sementara ia tidak dapat membuktikan pemerintahannya efektif ketika berkuasa, maka para pemilih dapat dan sering menghukum ketidakjujuran mereka melalui kotak suara. Ujian tersulit bagi politisi yang jujur dan bermoral datang ketika ia harus mempertahankan ide-ide yang tidak populer namun benar. Tidak semua orang dapat lulus ujian tersebut. Namun demikian, hanya politisi tak bermoral yang hanya memandang "politik sama dengan popularitas". Pada saat yang sama, politisi bermoral tidak pernah berhasil hanya bekerja sendirian dalam memastikan kebaikan dan kepentingan umum. Hanya ketika mereka dapat saling mendukung satu dengan yang lain, mereka dapat tampil percaya diri bahwa pada saat-saat kritis bagi negara, mereka dapat mengatasi dan melampaui perpecahan politik.

Penting dicatat bahwa kejujuran/ketulusan politik bukan semata tanggung jawab utama politisi. Opini publik harus memainkan peran di sini. Intinya, kejujuran politik – para politisi bermoral – lebih menyerupai mereka yang mengakar dalam masyarakat yang ditandai dengan budaya toleransi, solidaritas, dan menikmati persamaan hak-hak individu.

Mereka akan mengadopsi prinsip-prinsip berikut ini: 1) jika kebobrokan-kebobrokan tertentu yang tidak dapat dicegah dijumpai dalam konstitusi politik, atau dalam relasi-relasi Negara, adalah tugas kepala Negara khususnya dan para politisi pada umumnya untuk melakukan koreksi sesegera mungkin dan memperbaiki konstitusi sehingga diharapkan dapat sesuai dengan kebenaran alamiah yang disajikan sebagai model yang sesuai dengan nalar; 2) Politisi yang dibimbing oleh moralitas tidak mungkin dapat membuat perbaikan dengan menghiasi prinsip-prinsip pemerintahan yang bertentangan dengan kebenaran, atas dasar keyakinan bahwa manusia tidak dapat merealisasikan kebaikan sesuai dengan ide yang dijelaskan oleh nalar, maka mereka dapat melakukan upaya

apapun untuk mengabadikan pelanggaran atas kebenaran; 3) bertindak atas dasar prinsip formal dari nalar praktis (*practical reason*), yakni prinsip yang mengatakan "bertindaklah kamu menurut kehendakmu agar nuranimu menjadi hukum universal apapun tujuannya", dan persoalan tentang hak menjadi persoalan moral dalam dirinya.

## **2. Moralis Politis**

Moralis politis adalah orang yang menggunakan moralitasnya untuk memenuhi kemajuan atau kepentingannya sendiri sebagai politisi atau negarawan. Perilaku mereka lebih mengutamakan dimensi politik. Mereka melihat segala sesuatu sebagai masalah teknis, dan mengambil justifikasi moralitas yang sesuai dengan masalah yang ada di tangan mereka. Karenanya, aktivitas mereka dalam politik hanya untuk mengeksploitasi rakyat melalui berbagai muslihat atau tipuan membahayakan. Ketika mereka mencoba memecahkan masalah, mereka melakukan atas dasar pengalaman terdahulu, bukan atas dasar nalar yang benar.

Ciri-ciri moralis politis adalah: 1) individu yang memakai sistem moralitas untuk dirinya sendiri sehingga menempatkannya dalam posisi subordinat dan harus melayani kepentingan mereka sendiri; 2) memulai tindakan politik sebagai tujuan itu sendiri dan karenanya mereka menundukkan prinsip-prinsip etika politik pada tujuan mereka sendiri – apa yang mereka lakukan sebagaimana ungkapan yang mengatakan "melakukan sesuatu dari kebalikannya" sehingga mereka frustrasi dengan niat baik membawa politik agar berjalan sesuai dengan moral; dan 3) bertindak atas dasar prinsip material yang mereduksi persoalan-persoalan hak-hak nasional, internasional dan universal sekedar pada level teknis.

Jadi, elaborasi dari dua arketipe di muka menengarai bahwa politisi bermoral mempraktikkan politik di dalam ikatan-ikatan yang diletakkan oleh

moral, sementara moralis politis memilih-memilah dan mengubah bentuk moral dengan maksud untuk memuaskan tuntutan-tuntutan politik pada suatu ketika (baca: jangka pendek). Yang pertama dapat dijadikan sebagai teladan, sementara yang terakhir merupakan "bajingan" sungguhan yang mengikuti jalan Machiavellian. Yang pertama menjalankan kegiatan melalui aksi politik untuk memperjuangkan penerimaan pluralitas, memperjuangkannya melalui aksi-aksi persuasif dan wicara serta jauh dari kekerasan. Sementara yang terakhir menangani politik dengan mentalitas tingkat kerja di mana orientasi kebutuhan hidup dan obsesi akan siklus produksi-konsumsi sangat dominan. Politisi semacam ini cenderung menjadikan politik sebagai mata pencaharian utama. Maka tidak perlu aneh jika dijumpai pada mereka kemiskinan visi dan misi politik.

Suatu cara alternatif untuk memformulasi perbedaan antara dua tipe ini adalah dengan melihat keutamaan yang diberikan kepada iman atau kepada pengalaman. Argumen Kant menyatakan bahwa kita berusaha menuju suatu hasil/tujuan yang melampaui serangkaian pengalaman kita, sementara orang-orang sinis akan menolak kemungkinan keadaan yang pernah muncul. Oleh karena itu, adalah suatu keharusan praktis bahwa untuk mencapai hasil atau tujuan itu perlu disediakan suatu obyek imani untuk menyinari jalan moral. Kita hanya dapat meraih tujuan/hasil sejauh agen-agen moral – sementara *nature* manusia meraih arah praktisnya terlepas dari tindakan-tindakan – bahkan usaha-usaha kita dalam hal ini hanya dapat dipertahankan jika kita juga mengetahuinya menjadi praktis, yakni kita yakin akan realitas tujuan utama mereka. Jadi, argumen akan keharusan praktis masuk dalam kategori "kepercayaan-kepercayaan yang berguna" dan memiliki status ontologis di dalam argumen tersebut. Artinya jika kita percaya bahwa tujuan perdamaian abadi dalam istilah Kant, atau hidup baik bersama dan untuk orang lain dalam istilah Ricoeur misalnya, merupakan tujuan praktis, dan jika kita mengikuti

diktum-diktum nalar, maka kita akan bertindak dari titik tolak moral yang pada akhirnya akan meningkatkan praktis kualitas dari tujuan tersebut.

### **Kriteria Politik Bermoral**

Memperhatikan paparan di atas dapat dikatakan bahwa para moralis politis adalah mereka yang condong kepada despotisme dan buruk dalam praktik politik, yang sering kali bertentangan dengan kepercayaan politik. Di sisi lain para politisi bermoral yang dibimbing oleh moralitas dapat menciptakan perbaikan-perbaikan yang mungkin dilakukan untuk meluruskan prinsip-prinsip pemerintahan yang bertentangan dengan kebenaran, dengan satu resep bahwa nalar manusia mampu merealisasikan kebaikan yang sesuai dengan idea.

Untuk melihat suatu kegiatan berpolitik itu bermoral atau tidak bermoral, menurut Kant, dapat diukur melalui beberapa aksioma berikut ini.<sup>17</sup>

1. *Fac et excusa*: menggunakan kesempatan dalam kesempatan untuk memperbesar kepemilikan sendiri dengan merampas apa yang menjadi hak dan kewajiban negara atas rakyatnya dan justifikasi atas tindakan itu dapat dilakukan dengan sangat mudah dan semua bisa diatur kemudian sehingga sangat terbuka kemungkinan terjadinya pemalsuan fakta dan pelanggaran-pelanggaran. Ini menengarai sifat egosentrisme dan nir-solidaritas dalam aksi-aksi politik mereka.
2. *Si fecisti, nega*: kesalahan apapun yang telah dilakukan oleh dirimu sendiri, seperti mendorong masyarakat untuk frustrasi dan memberontak, harus ditolak sebagai kesalahan dirimu sendiri; dengan kata lain kesalahan itu merupakan kesalahan banyak orang, dan sedapat mungkin berupaya berkelit dari kesalahan yang dilakukannya sendiri dengan menyandarkannya pada

---

<sup>17</sup> Lihat Immanuel Kant, *Perpetual Peace: A Philosophical Essay*, terj. M. Campbell Smith, (Bristol: Thoemmes, 1992); juga *Kant's Principles of Politics* (1891); the Online Library of Liberty update 20 April 2004.

orang lain. Aksi politik semacam ini menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab baik secara moral di hadapan Tuhan maupun secara prosedural di hadapan manusia, di hadapan sistem negara dan pemerintahan yang bersih dan baik.

3. *Divide et impera*: ada pemimpin-pemimpin atau politisi tertentu yang diistimewakan karena telah dipilih oleh rakyatnya untuk memimpin mereka. Namun kemudian, kepercayaan itu disalahgunakan untuk menumbuhkan kecurigaan dan perselisihan di kalangan rakyatnya sebagai cara-cara yang paling aman agar rakyat tunduk kepada mereka satu demi satu dengan mengatasnamakan pretensi membantu mereka yang lemah. Karenanya tidak ada sesuatu yang lebih berarti kecuali kekuasaan politik yang dapat mereka perhitungkan, dan inilah yang mendorong mereka untuk terus memperbesar kekuasaan dengan jalan apapun yang bisa mereka lakukan.
4. *Fiat justitia, pereat mundus*: peribahasa ini memang kelihatan agak angkuh namun benar. Umumnya dimaknai: biarkan kebenaran menang meskipun semua bangsa di dunia ini binasa karenanya. Jadi, prinsip kebenaran ini menumpas seluruh cara-cara yang tidak jujur yang dibentuk oleh intrik atau kekuasaan. Namun demikian, ungkapan ini jangan disalahpahami sebagai membolehkan siapapun untuk melakukan haknya dengan kekerasan yang akan bertentangan dengan tugas etis. Ia mesti dipahami sebagai mementingkan kewajiban mereka yang sedang berkuasa untuk mempertahankan kebenaran dan keadilan, bukan untuk membungkam hak siapapun, atau merampasnya, dan tidak bersimpati terhadap yang lain. Proposisi ini berarti bahwa keyakinan-keyakinan politik harus tidak mulai dari kesejahteraan dan kebahagiaan yang diharapkan, tidak pula dari tujuan di mana setiap orang menjadikan obyek dari kehendaknya sebagai prinsip empirik tertinggi dalam politik; justru mereka harus memulai dari konsepsi murni tentang tugas Kebenaran dan Keadilan sebagai prinsip kewajiban yang diberikan secara a priori oleh nalar. Oleh karena itu, secara obyektif dalam

teori tidak ada antagonisme antara moral dan politik. Namun secara subyektif, sebagai akibat dari kecenderungan egosentrisme para politisi, maka antagonisme semacam itu ditemukan dan barangkali akan terus ada dan berperan sebagai pengasah bagi kebaikan.